

**PERAN PEMERINTAH DESA SALAON TONGA-TONGA
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan
Ronggurnihuta Kabupaten Samosir)**

SKRIPSI

OLEH :

BOB SANMA PARSAULIAN SIMBOLON

188510066



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

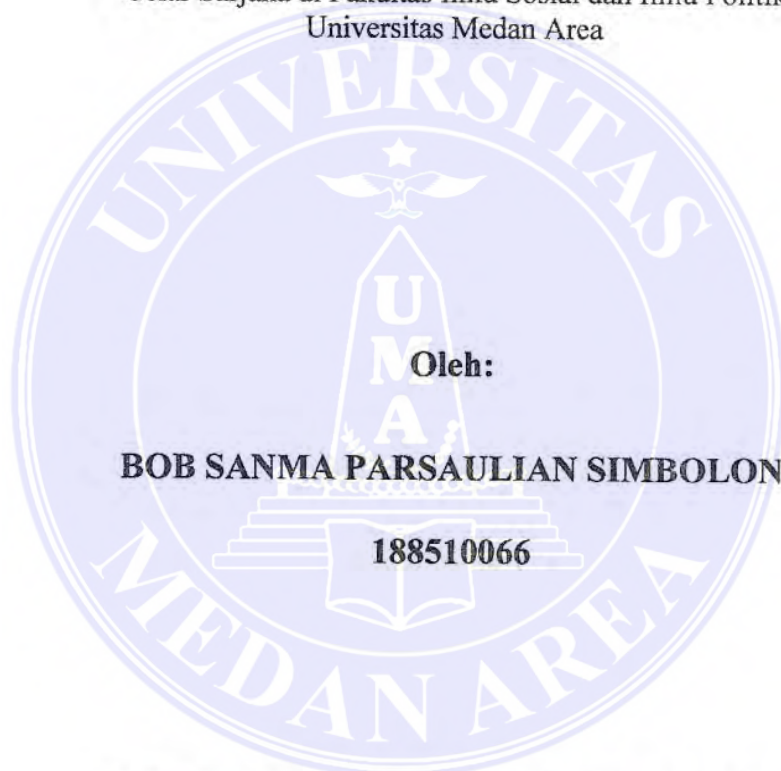
Document Accepted 23/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERAN PEMERINTAH DESA SALAON TONGA-TONGA
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK PEMBANGUNAN DESA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



Oleh:

BOB SANMA PARSAULIAN SIMBOLON

188510066

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/5/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa.

Nama : Bob Sanma Parsaulian Simbolon

NPM : 188.510.066

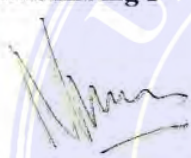
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

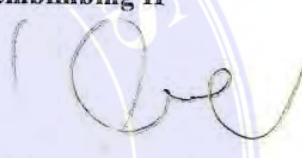
Disetujui oleh :

Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Nina Angelia, S.Sos, M.Si


Evi Yunita Kurniaty S. Sos, M. IP

Mengetahui:

Dekan

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si



Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 November 2022




Bob Sanma Parsaulian Simbolon

188.510.066

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bob Sanma Parsaulian Simbolon

NPM : 188510066

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 November 2022

Yang Menyatakan



Bob Sanma Parsaulian Simbolon
188.510.066

iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Bob Sanma Parsaulian Simbolon, anak dari Esman Simbolon dan Risma Manik, Lahir pada 9 Oktober 2000 di Lumban Sona, dua puluh satu tahun yang lalu. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara, Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 10 Salaon Tonga Tonga pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pangururan, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Swasta Santo Mikhael Pangururan. Pada tahun 2018 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi mahasiswa yaitu menjadi Panitia Natal Universitas Medan Area pada tahun 2019 menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) UMA pada 2018-2020.



ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan. Untuk itu diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan, maka pemerintah desa memegang peran yang menentukan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kendala yang dialami pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan Teori Peran pemerintah oleh Ryaas Rasyid (2010) Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga Tonga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa dan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah baik sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, sudah dapat direalisasikan dengan cukup baik. Namun perlu lebih mengintensifkan metode pendekatan persuasif dalam setiap peran sebagai dinamisator dan fasilitator yang dilakukan agar terbangun hubungan yang harmonis dan seimbang antara pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Desa adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga waktunya banyak dihabiskan dilahan pertanian. Aparatur desa dalam melaksanakan sosialisasi tidak rutin karena pekerjaan yang banyak sehingga sosialisasi menjadi terhambat dilaksanakan dan pelaksanaan tupoksi yang kurang maksimal.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Community participation in development is cooperation between the community and the government in planning, implementing and financing development. For this reason, it is necessary to have a driving force or element that is able to move and direct the ability of the community to be able to realize the ideals of development, so the village government plays a decisive role. The problems in this study are the lack of community participation in village development and the obstacles experienced by the village government to increase community participation. This research method uses Government Role Theory by Ryaas Rasyid (2010) Government as Regulator, Dynamizer, Facilitator. The type of research used is qualitative and the data collection techniques used are observation, interviews with a number of informants. The purpose of this study was to determine the role of the Salaon Tonga Tonga Village Government in increasing community participation for village development and the obstacles faced by the Village Government in increasing community participation. The results of the study indicate that the role of the government as a regulator, dynamist, and facilitator, can be realized quite well. However, it is necessary to further intensify the method of persuasive approach in each role as a dynamist and facilitator which is carried out in order to build a harmonious and balanced relationship between program implementation and community needs. The obstacles faced by the village government are the level of public awareness is still low and the majority work as farmers so that a lot of time is spent on agricultural land. The village apparatus in carrying out socialization is not routine because there is a lot of work so that socialization is hampered and the implementation of the main tasks and functions is not optimal.

Keywords: *Role, Village Government, Community Participation*

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan lindungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir).”**

Penulisan ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh sarjana ilmu pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan-kesulitan seperti pengumpulan bahan, kurangnya pengalaman dalam penulisan karya ilmiah, keterbatasan waktu, tenaga dan dana serta sarana yang dimiliki peneliti sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini peneliti tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST,M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing utama telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Ibu Fitri Suciati Lubis, S.Sos,MSP selaku sekretaris telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan mengajari peneliti selama masa perkuliahan di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Seluruh staf dan pegawai/karyawan akademik di Universitas Medan Area.
9. Bapak Polman Malau, S.Pd selaku Kepala Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di kantor desa tersebut.
10. Aparatur-Aparatur Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir yang telah banyak membantu peneliti selama pelaksanaan penelitian di kantor desa tersebut.
11. Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga atas waktu, tenaga serta informasi yang diberikan kepada penulis terkait Desa Salaon Tonga Tonga.
12. Teristimewa kepada Ayahanda Esman Simbolon dan Ibunda Risma Manik yang telah memberikan dorongan dana, sarana dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat saudara dan saudariku tercinta, yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
14. Untuk saudara/i terkasih Ricco, Elsa, dan Herlindut yang mendukung serta memotivasi saya untuk mengerjakan skripsi ini.

15. Rekan-rekan mahasiswa stambuk 2018 program Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang saling membantu dan memberikan dorongan moral dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kasih melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak/Ibu/Saudara/i. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, oleh sebab itu dengan senang hati peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sebagai bahan masukan dan perbaikan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Medan, 11 Oktober
2022

Bob Sanma Parsaulian
Simbolon
188.510.066

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	ivv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Peran Pemerintah Desa.....	8
2.1.1 Pengertian Peran.....	8
2.1.2 Pemerintah Desa.....	10
2.2. Partisipasi Masyarakat.....	14
2.3. Pembangunan Desa	17
2.4. Penelitian Terdahulu.....	18
2.5. Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Metode Penelitian.....	24
3.2. Lokasi Penelitian	25
3.3. Waktu Penelitian	25
3.4. Informan Penelitian	26
3.5. Teknik Pengumpulan.....	27
3.6. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Profil Desa Salaon Tonga-Tonga	31
4.1.2 Demografi Desa Salaon Tonga-Tonga.....	32
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga.....	36
4.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga	41
4.2. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa	42
4.3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Salaon Tonga Tonga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Pembangunan Desa	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	60
LAMPIRAN.....	64



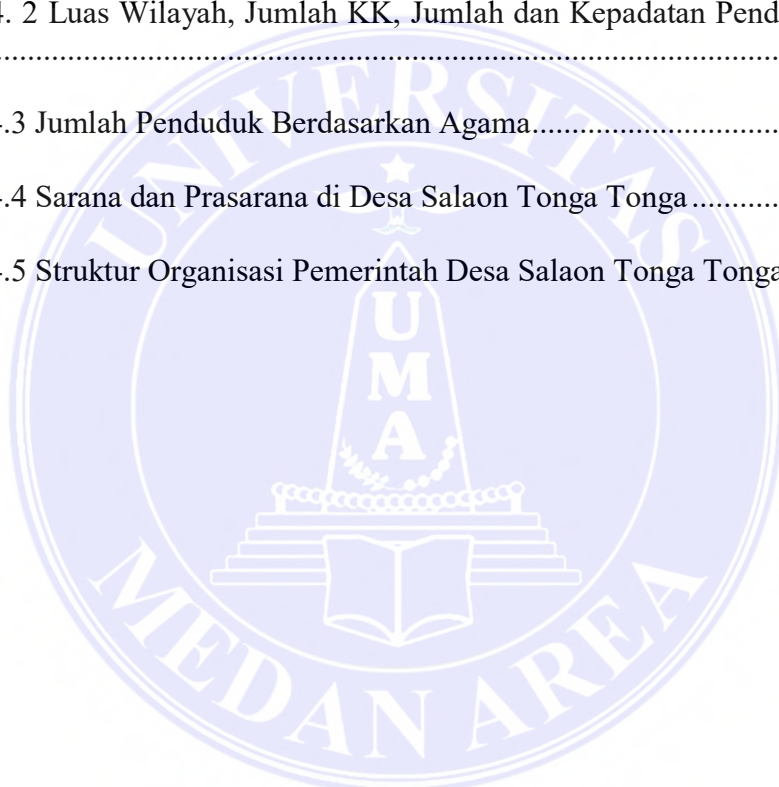
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salaon Tonga Tonga	36



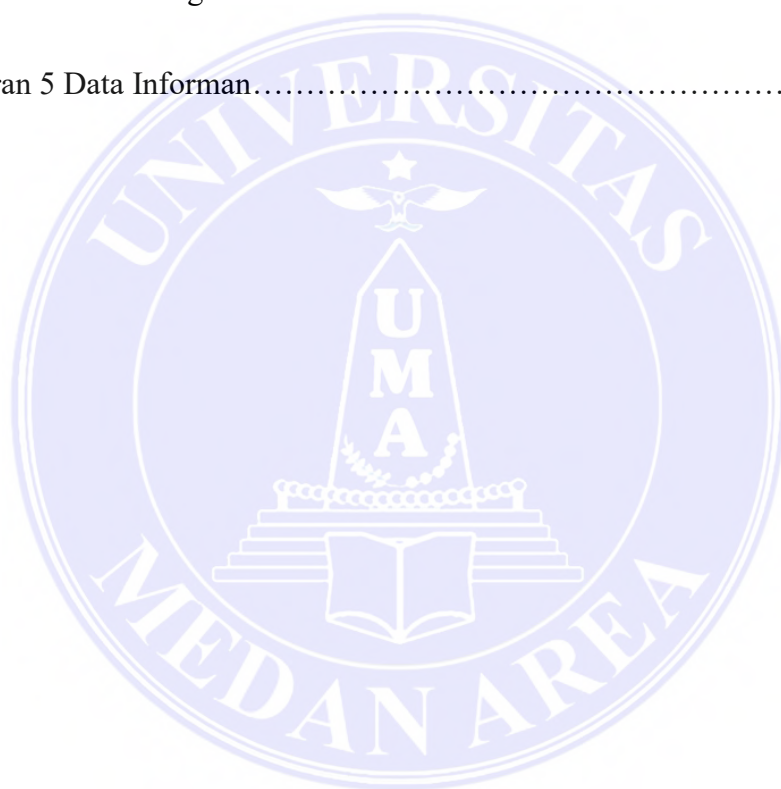
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	26
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Salaon Tonga Tonga per Dusun	33
Tabel 4. 2 Luas Wilayah, Jumlah KK, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Dusun	33
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	34
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana di Desa Salaon Tonga Tonga	35
Tabel 4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salaon Tonga Tonga 2022	37



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pengajuan Pertanyaan Wawancara.....	64
Lampiran 2 Dokumentasi Tempat Penelitian.....	66
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	65
Lampiran 4 Surat Pengambilan Data/Riset.....	66
Lampiran 5 Data Informan.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara formal Desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan, penghormatan atas desa yang ada sesuai dengan keberagamannya serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang tetap dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul serta dikendalikan oleh seorang Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Pamong Desa. Status desa memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan nasional, karena desa merupakan pionir dalam mencapai keberhasilan proyek-proyek yang direncanakan pemerintah. Posisi desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, karena desa merupakan ujung tombak dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Desa telah dianggap sebagai basis pembangunan dan juga sebagai penerapan dari sistem pembangunan yang mencerminkan bentuk pemerintahan yang *bottom up*, dimana semua rencana pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa adalah tujuan dari setiap rencana pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah untuk memberikan kemandirian atau kekuatan masyarakat desa agar mereka dapat mengurus dirinya sendiri.

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam Negara mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya. Sebagaimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melihat tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan, pemerintah kepada masyarakat itu sendiri.

Peran pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing masyarakat. Melihat yang terjadi pada saat ini bahwa masyarakat di era modern dengan begitu pesat dan berkembangnya ilmu

tehnologi dan komunikasi sehingga dapat mengindikasikan untuk semua masyarakat harus mampu mempersiapkan dirinya untuk terus mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat sekitarnya saja akan tetapi juga menjadi tugas pokok bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk terus berperan aktif dalam mengawal, dan mendampingi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sehingga mampu mengambil bagian yang strategis demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka pemerintah desa memegang peranan yang menentukan arah pembangunan desa.

Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa untuk mengembangkan otonomi asli desa dengan meneguhkan kembali keberagaman desa. Undang-Undang desa menetapkan status desa sebagai badan hukum independen yang terkait dengan pemerintahan nasional. Pemerintahan desa berwenang menetapkan peraturan desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi dengan persetujuan bersama badan perwakilan desa (BPD).

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Sebagai penanggungjawab pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa harus mampu mengemban tugas yang dibebankan, termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional dalam melaksanakan pembangunan desa bukan hanya tugas dari pemerintah desa, tetapi merupakan tugas dari seluruh warga desa.

Pembangunan desa akan sulit terlaksana apabila tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Meskipun pemerintah tengah gencar mensosialisasikan dana desa yang ditujukan agar pembangunan tiap desa meningkat namun tetap saja apabila masyarakatnya acuh tak acuh maka dana desa yang telah diberikan pun akan sulit direalisasikan sesuai peruntukannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

Dalam pendekatan partisipatif, partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi fisik, tetapi juga partisipasi yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi masalah dan potensi di lingkungan mereka sendiri, dan kemudian menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat penting karena pembangunan tidak akan berjalan normal jika masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan desa.

Dengan adanya peran serta dan partisipasi masyarakat, fungsinya tidak hanya memberikan dukungan terhadap pembangunan, tetapi yang lebih penting dapat menikmati hasil pembangunan. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu bentuk

partisipasi, dimana ketika masyarakat kuat, maka kemampuan mereka meningkat dan mereka lebih mampu menghadapi tantangan hidup tanpa bergantung pada orang lain, dan peran orang luar berkurang.

Masyarakat menjadi objek utama dalam keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya bahwa berhasil tidaknya pemerintah dilihat dari peningkatan atau penurunan tingkat kehidupan masyarakat. Pemerintah juga harus mampu berperan penting untuk mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengembangan masyarakat sehingga dengan ikut sertanya seluruh elemen masyarakat maka pemerintah akan lebih mudah untuk memahami hal-hal yang terdapat di masyarakat.

Menurut pengamatan penulis, di Desa Salaon Tonga-Tonga terlihat partisipasi masyarakat masih kurang, hal ini disebabkan, kurangnya pembinaan dan motivasi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti ajakan dan himbauan untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan, kerja bakti membangun jalan. Serta jaranganya pemerintah desa atau kepala desa turun langsung menemui masyarakat, mendengar keluhan masyarakat serta kebutuhan masyarakat, dan kurang pedulinya masyarakat terhadap pembangunan desa menganggap pembangunan itu merupakan tanggungjawab pemerintah.

Dalam hal ini, peneliti akan meneliti bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir. Ketertarikan ini muncul dikarenakan program pembangunan desa merupakan program yang jika dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap

ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat desa di setiap wilayah atau kota di Indonesia, khususnya di Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir.

Maka kendali program pembangunan desa harus sepenuhnya ditangani secara swadaya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa harus menguasai program pembangunan desa serta peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih untuk mempelajari program pembangunan desa, karena jika program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, maka pembangunannya terlihat jelas, dan tidak akan terjadi kerancuan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah maka dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang lebih mendalam yaitu,

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran untuk meningkatkan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi semua pihak yang terkait, terutama semua sektor masyarakat. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pembangunan pedesaan dan mendorong pemerintah pedesaan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan pedesaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Peran Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat" (Departemen Pendidikan Nasional. 2005: 751). Bauer berpendapat bahwa peran (seperti dikutip Haris, 2012: 204) "sebagai persepsi mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut".

Istilah "peran" sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau "peran" dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, yang berarti aktor: tugas seseorang atau fungsi. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan sosial maka seseorang yang diberikan suatu kedudukan, juga diharapkan melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi dari kedudukan tersebut, karena itulah ada yang disebut *role expectation*. Dari pengertian peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan karakter yang dibawakan oleh seseorang dalam sebuah panggung permainan.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa "peran (role)

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243).

Adapun dalam pengertian lain bahwa peran adalah suatu fungsi yang diharapkan dari seseorang yang sedang memegang jabatan. Jadi, suatu peran yang menyebabkan perilaku seseorang memiliki pengaruh dalam menjalankan fungsinya. Peran berkaitan dengan aspek dinamis posisi, baik individu maupun institusional. Soekanto (2005:268) menyatakan "Jika seseorang atau lembaga melakukan apa yang disebut hak, kewajiban menurut kedudukannya, maka ia menjalankan perannya. Peran adalah suatu bentuk penyesuaian diri terhadap posisi atau kedudukan yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran membuat pelaku melakukan fungsi tertentu.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu. Penulis menyimpulkan bahwa peran atau peranan adalah sebuah rangkaian perilaku seseorang yang diharapkan sekelompok orang atau masyarakat untuk dapat menjalankan keinginan atau harapan yang diorganisir.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Menurut HAW.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” pemerintahan desa dapat diartikan sebagai : Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, dan pelaksanaannya ditujukan untuk daerah pedesaan. Pemerintahan desa merupakan proses memadukan upaya masyarakat desa dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 menyebutkan : pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintah desa. Dalam penyelenggaraannya pemerintah desa harus berdasarkan asas :

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Tertib kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas
- 6) Akuntabilitas
- 7) Efektifitas dan efisiensi
- 8) Kearifan lokal
- 9) Keberagaman
- 10) Partisipatif

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan modern dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang publik, termasuk perpajakan masyarakat. Sebagai sistem modern, pemerintah tingkat desa tidak hanya harus menggunakan legitimasi simbolik dan sosial, tetapi juga mengkonstruksi legitimasi dari perspektif kinerja politik dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui Camat.

Selain BPD di desa, juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa, lembaga tersebut merupakan mitra kerjasama pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Organisasi kemasyarakatan ini didirikan atas prakarsa masyarakat desa, dan jumlah serta susunan pengurusnya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Badan

kemasyarakatan ini merupakan mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan berbasis masyarakat. Aparatur Pemerintah Desa sebagai pimpinan dan penyelenggara Pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.

Untuk itu, pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau bertindak secara rasional dalam membuat keputusan yang akan terjadi ditengah masyarakat. Selain itu, keputusan yang akan dibuat tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga harus memiliki peran sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32), Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya

pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme. Peran regulator kemudian dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan atau mekanisme. Hal ini dimaksudkan bahwa terkait dengan aturan atau mekanisme haruslah diciptakan oleh pemerintah agar menjadi sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memeberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk lebih mengembangkan pembahasan terkait dengan dinamisator kemudian diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu (1) sosialisasi, (2)

pendampingan. Sosialisasi yang memiliki pengertian secara umum yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli di bidang pembangunan desa yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan saran dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan sautu kegiatan.

2.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam

pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk menyumbangkan sumber daya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagai manfaat rencana pembangunan dan evaluasi rencana pembangunan. Menurut Verhagen dalam Mardikanto (2013:167), "partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu".

Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri. Sastropeotro (2011:01), partisipasi adalah "keterlibatan mental atau pikiran dan perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan". Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Theodaron dalam Mardikanto (2012:01) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan "keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan di sini atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan".

Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan

orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama. Isbandi (2007:27), Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevakuasi perubahan yang terjadi. Suryono (2001:124), partisipasi masyarakat merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dilihat sebagai bagian dari proses, tetapi juga bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan indikator tingkat keberhasilan khususnya dalam perencanaan pembangunan desa. Jadi Partisipasi dapat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk pengembangan organisasi dan sebagai tujuan pengembangan itu sendiri.

Ketentuan partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan perubahannya, yaitu pasal 354 Bab XIV mengenai partisipasi masyarakat. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bentuk partisipasi masyarakat berupa konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat dalam partisipasinya dapat berfungsi menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

2.3. Pembangunan Desa

Menurut Cangara (2014:240) pembangunan masyarakat desa mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan dan pengorganisasian masyarakat. Sedangkan pembangunan desa sebagai *rural development* lebih luas dimana pembangunan masyarakat desa sudah tercakup didalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan. Adisasmita (2006:19), Pembangunan Desa adalah rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah di desa. Menurut Sondang P. Siagian (2005:9) mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Bentuk pembangunan desa adalah adanya berbagai rencana dan proyek pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan desa. Rencana dan proyek ini tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, makna pembangunan tidak hanya untuk menciptakan hal-hal baru dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti yang lebih luas.

Tujuan pembangunan desa antara lain untuk meningkatkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat

(empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Arti penting pembangunan desa terletak pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi tidak hanya diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar (stakeholder eksternal), atau partisipasi dalam upaya mensukseskan rencana pembangunan ke desa, tetapi tidak terbatas pada itu saja. Dalam partisipasi, yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan pembangunan desa berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya, mereka dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, potensi suatu tempat, sekecil apapun, tidak dapat diabaikan, karena akan menjadi sumber pembangunan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan topik yang sama dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan agar penelitian yang kita lakukan sekarang dapat berjalan dengan baik. Penelitian yang dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini ada lima penelitian yang akan diuraikan di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan	Kualitatif Deskriptif	Pertama, peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa karyamuktimootilango	Tokoh yang dipakai sebagai objek yang diteliti	Penelitian yang akan saya lakukan mengulas peran

<p>Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Muh Fachri Arsjad (2018)</p>		<p>kabupaten gorontalo masih kurang maksimal. Penilaian ini karena tiga kepala urusan, baik pemerintah. pembangunan dan umum mengakui bahwa perannya belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi didesa karya mukti adalah disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan.sarana dan prasarana dan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah desa.</p>	<p>yaitu Pemerintah Desa.</p>	<p>Pemerintah desauntuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan namun penelitian ini mengulas Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.</p>
<p>Peran Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bara kota Palopo Muhammad Hafid Fadilla (2016)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>dampak pemberdayaan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi sangatlah menjanjikan bagi setiap usaha masyarakat sehingga pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat sangat mampu untuk membantu masyarakat mengembangkan setiap potensi yang ada dengan baik dan sangatlah terbukti bahwa pemerintah telah berhasil dalam mensejahterahkan masyarakat guna menambah tingkat pendapatan dan nilai tambah bagi masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data menggunakan analisis kualitatif, mengolah data berdasarkan kepada data-data tertulis.</p>	<p>Sama-sama Berobjekan peran pemerintah desa</p>	<p>Penelitian yang akan saya lakukan mengulas peran Pemerintah desauntuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan namun penelitian ini mengulas peran pemerintah desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p>

<p>Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Desa Burau Pantai</p> <p>Rokki (2016)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Peran pemerintah desa bagi para petani rumput laut memberikan dampak positif terhadap peningkatan usaha masyarakat dari segi pendapatan. Strategi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan motivasi dan juga sebagai fasilitator dengan mengundang pihak dari luar untuk memberikan bimbingan dan pelatihan terkait mengelola rumput laut yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga membentuk beberapa kelompok tani sebagai strategi untuk membantu petani rumput laut mendapatkan bantuan modal pembelian bibit atau pun fasilitas alat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.</p>	<p>Sama-sama berobjekan peran desa pemerintah</p>	<p>Penelitian yang akan saya lakukan mengulas peran Pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan namun penelitian ini mengulas peran pemerintah desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p>
<p>Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga</p> <p>Emylio Saputra Lingga (2015)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Peran Kepala Desa masih kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Kepala Desa selalu memberikan informasi informasi yang perlu untuk di ketahui oleh masyarakatnya, dan Kepala Desa juga kurang maksimal dalam mengambil suatu keputusan dan penggunaan dana yang sering melenceng dengan apa yang awalnya direncanakan.</p>	<p>Sama-sama berobjekan peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi</p>	<p>Penelitian yang akan saya lakukan mengulas peran Pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan namun penelitian ini mengulas Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa , dimana fokus yang diteliti adalah kepala pemerintahannya yaitu kepala</p>

				desa.
Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat (Studi di Desa Lobo Kota Kecamatan Touloolan Kabupaten Minahasa Tenggara) Milka Miranda 2013	Kualitatif Deskriptif	Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berperan, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah berperan tapi tidak berhasil sesuai rencana (musrembang), kemudian dalam pembinaan masyarakat pemerintah tidak berperan dapat dilihat dari program pemerintah yang sangat minim, begitupun pada pemberdayaan masyarakat. pemerintah tidak berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, hal ini jelas pada penjelasan bahwa program pemerintah sangat minim	Sama-sama Berobjekan pemerintah desa dalam hal partisipasi.	Penelitian yang akan saya lakukan mengulas peran Pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan namun penelitian ini mengulas Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dimana fokus yang diteliti ke arah peranan bukan peran

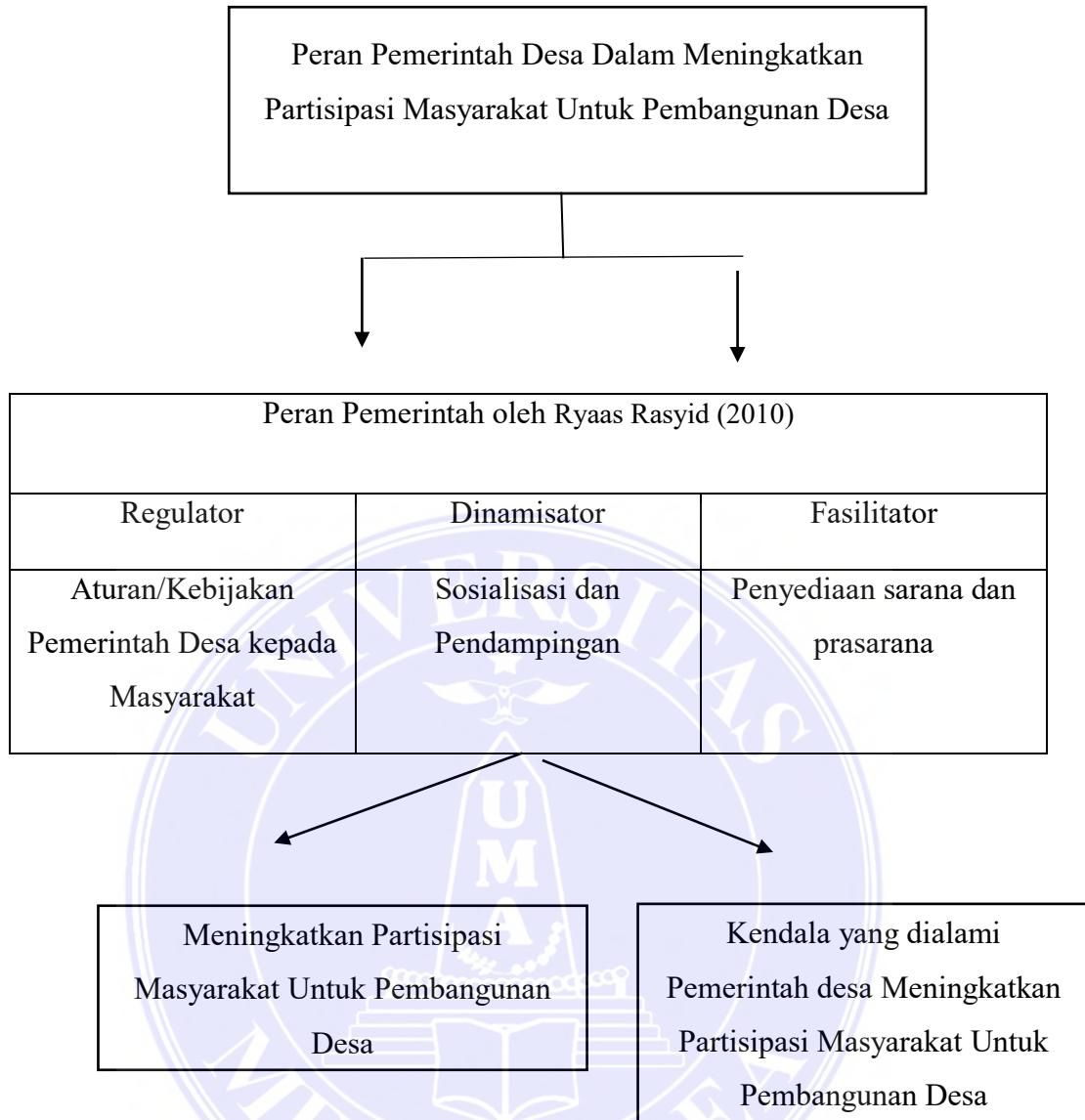
2.5. Kerangka Berpikir

Peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan langkah yang di ciptakan pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk konsep pemikiran yang di tuangkan serta pelaksanaannya di tengah masyarakat. Untuk melihat peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu sebagai regulator dimana didalamnya terdapat aturan mendasar tentang mekanisme meningkatkan partisipasi masyarakat serta kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah sebagai dinamisor didalam di dalamnya terdapat peran pemerinath dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan, kemudian indikator ketiga pemerintah

sebagai fasilitator dimana di dalamnya terdapat peran pemerintah dalam hal pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

Peran pemerintah yang dilakukan di Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir merupakan bentuk kerja pemerintah untuk memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan desa, dan pemerintah juga berperan penting dalam menerbitkan aturan yang mendasar untuk menjadikan pola umum dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat serta menjadi motor penggerak bagi seluruh lapisan masyarakat baik tingkat regional maupun tingkat pusat untuk bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga Tonga dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa”. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga Tonga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa dan Kendala yang dialami Pemerintah desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa, maka dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan hasil yang sesuai, dalam hal ini termasuk tahapan penelitian. Dalam hal ini dapat dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maka penulis melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan.

Menurut Moleong (2019: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2019: 4), mengatakan penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena data yang diperoleh berupa kata-kata dan perilaku, maka peneliti memakai jenis penelitian yang memakai penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2019: 11), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan yang menjadi permasalahan atau fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian dalam melihat bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Alasan dari peneliti menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada Desa Salaon Tonga Tonga ini adalah Masih kurangnya peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021/2022. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan perencanaan waktu empat bulan yaitu dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2021		2022											
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyusunan Proposal	■													
2.	Seminar Proposal		■												
3.	Perbaikan Proposal			■	■	■									
4.	Penelitian						■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Penyusunan Skripsi							■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Seminar Hasil												■	■	■
7.	Perbaikan Skripsi												■	■	■
8.	Sidang Meja Hijau														■

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah salah seorang yang menjadi anggota kelompok partisipan yang bertugas sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan sebuah penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016:300). Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

- a. Informan inti yaitu para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan

tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019:25), maka adapun yang menjadi informan inti dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yaitu Polman Malau S.Pd.

- b. Informan Utama yaitu tokoh yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang dipelajari (Sugiyono, 2019:25). Maka adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Sihar Simbolon selaku Sekretaris Desa Salaon Tonga-Tonga
- c. Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, (2019:25). Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah ketua BPD Salaon Tonga-Tonga Jonner Manik dan Mangelek Tua Nainggolan S.Pd selaku Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa peran Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam program pembangunan Desa di Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir.

- a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Peneliti melakukan pengamatan di lapangan dengan mendatangi Kepala desa beserta Perangkat Desa Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir dan mencari Data dan Informasi yang dibutuhkan, serta melihat tempat-tempat yang menjadi objek pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan. Peneliti akan melakukan pertemuan dengan informan guna melakukan komunikasi langsung melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dengan beberapa informan berbeda baik itu aparatur Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir ataupun masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian Peran Pemerintah Desa. Peneliti dalam hal ini mengabadikan suatu kegiatan-kegiatan lapangan yang sedang diteliti. Dalam membuat dokumentasi ini peneliti menyiapkan sebuah kamera handphone untuk

mengabadikan gambar kegiatan yang berlangsung dalam rangka penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam program Pembangunan Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir. Dokumentasi dilakukan agar peneliti dapat memperlihatkan bukti data yang dapat dipertanggung jawabkan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan semuanya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis model interaktif. Analisis model interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan yang cukup banyak hasilnya, karena itu perlu dan harus dicatat dengan teliti, jelas dan juga rinci. Oleh karena itu perlu adanya dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya meringkas, memilih yang menjadi inti-inti, memusatkan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dan mengurangi yang tidak perlu. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada peran Pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

b. Penyajian Data

Setelah data sudah direduksi maka tahap selanjutnya adalah disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Data yang didapat dari Desa Salaon Tonga-Tonga kemudian disusun dan dikelompokkan pada sub bagian masing-masing.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat dibuat kesimpulan. Setelah mengetahui dengan jelas dan pasti peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa maka dapat ditarik kesimpulannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peran pemerintah sebagai regulator telah berjalan dengan baik terlihat dari masyarakat telah mengetahui tentang aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah desa untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diberdayakan. Dilihat dari keterangan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa belum ada peraturan desa yang khusus untuk menangani masalah tersebut, sehingga aturan yang berlaku sesuai dengan pola umum yang diturunkan dari pusat yaitu UU No 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa, dan kebijakan yang dibuat pemerintah desa masih berupa arahan, ajakan kepada masyarakat, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Peran Pemerintah sebagai dinamisator telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan baik tetapi tidak rutin karena adanya kesibukan dari pemerintah desa dan dari pihak masyarakat yang masih rendah kesadarannya dalam pembangunan desa sedangkan pendampingan yaitu dengan menempatkan tenaga yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk

pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah baik karena telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti ikut serta dalam melakukan gotong royong bersama masyarakat dan saat rapat desa. Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah bekerja dengan baik dilihat dari sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) telah dilaksanakan. Pemerintah desa juga menghadirkan tenaga ahli dari kecamatan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait pembangunan desa. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan oleh semua masyarakat karena itu adalah hak masyarakat

2. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Desa adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah karena kurang peduli terhadap pembangunan Desa Tonga-Tonga, tingkat kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan dapat dikatakan belum maksimal. Masyarakat Salaon Tonga Tonga mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga waktunya banyak dihabiskan dilahan pertanian dan ada juga yang beberapa mengharuskan mereka bekerja di luar desa karena belum mempunyai wilayah garapannya sendiri. Aparatur desa dalam melaksanakan sosialisasi tidak rutin karena pekerjaan yang banyak sehingga sosialisasi menjadi terhambat dilaksanakan dan pelaksanaan tupoksi yang kurang maksimal.

5.2. Saran

1. Sangat diperlukannya kesadaran dari masyarakat terhadap pembangunan Desa Salaon Tonga-Tonga agar hasil dari pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat.
2. Masyarakat dapat memberikan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan Aparatur desa lebih meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan sosialisasi tentang pembangunan desa Salaon Tonga-Tonga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi rukminto. 2007. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Arisandi. 2003. Biddle dan Thomas: Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial, Arginamis. Yogyakarta
- Cangara, Hafied. 2014. Pengantar Komunikasi. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Damsar. D dan Indrayani. 2016. Pengantar Sosiologi Perdesaan. Jakarta: Kencana.
- Mardikanto & Soebiato. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perfektif Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Alfabeta.
- Mardikanto, T dan Poerwoko soebiato, 2017. Teori Partisipasi masyarakat, dan Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pelayanan public. Bandung: Alfabeta
- Mondong, Hendra. 2011. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
- Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. USU. Medan.
- Sastropeotro. 2011. Partisipasi, komunikasi, persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang. 1988. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.
- Sugiyono , 2019. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R7D. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
- Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Skripsi dan Jurnal

Afrizal Fahlevi Lubis, Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal), Skripsi diterbitkan (Fisip UMSU:2018).

Arif., 2012. Peran dan fungsi pemerintah, pada 12 februari 2012

Arsjad Muh Fachri. 2018. Jurnal Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Universitas Gorontalo: Gorontalo.

Fadillah Muhammad Hafid, Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bara Kota Palopo, Skripsi (Palopo:Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri PALOPO, 2016).

Firdaus Riska, Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma. Palopo, 2020)

Gumilar, G. (2008). Sosialisasi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>.

Hendra Tri, peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan untuk pengembangani investasi, Skripsi diterbitkan (Fisip Lampung:2017).

Mondong, hendra, 2017, peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Jurnal Universitas Sumatera Utara

Nurdin, Muhammad. 2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rokki 2016. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Rumput Laut di Desa Burau Pantai. Skripsi IAIN Palopo.

Suharto. (2006). Membangun Masyarakat, Memberdaya Masyarakat. (Refika Adi)

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengajuan Pertanyaan Wawancara

Untuk Kepala Desa

1. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
2. Bagaimana Aturan dan Kebijakan yang dibuat pemerintah desa bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan desa ?
3. Apakah Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
4. Apakah Pemerintah desa memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
5. Apakah Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
6. Apa kendala yang dialami pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?

Untuk Sekretaris Desa

1. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
2. Bagaimana Aturan dan Kebijakan yang dibuat pemerintah desa bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan desa ?
3. Apakah Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?

4. Apakah Pemerintah desa memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
5. Apakah Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
6. Apa kendala yang dialami pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?

Untuk Masyarakat

1. Bagaimana Aturan dan Kebijakan yang dibuat pemerintah desa bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan desa ?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Pemerintah desa kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
3. Apakah Pemerintah desa memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?
4. Bagaimana Peran Pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?

Untuk BPD

1. Apakah BPD dalam hal penyusunan rancangan peraturan kepala desa maupun kebijakan yang dibuat oleh kepala desa selalu diikuti sertakan dalam penyusunan dan pengesahan peraturan maupun kebijakan atau arahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa ?
2. Menurut bapak Apa kendala yang dialami pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa ?

Lampiran 2 Dokumentasi Tempat Penelitian



Gambar 1. Kantor Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir (Sumber: Dokumen Pribadi, 20 April 2022)



Gambar 2. Informan Kunci Bapak Polman Malau S.Pd Selaku Kepala Desa Salaon Tonga-Tonga (Sumber: Dokumen Pribadi, Senin, 04 April 2022)

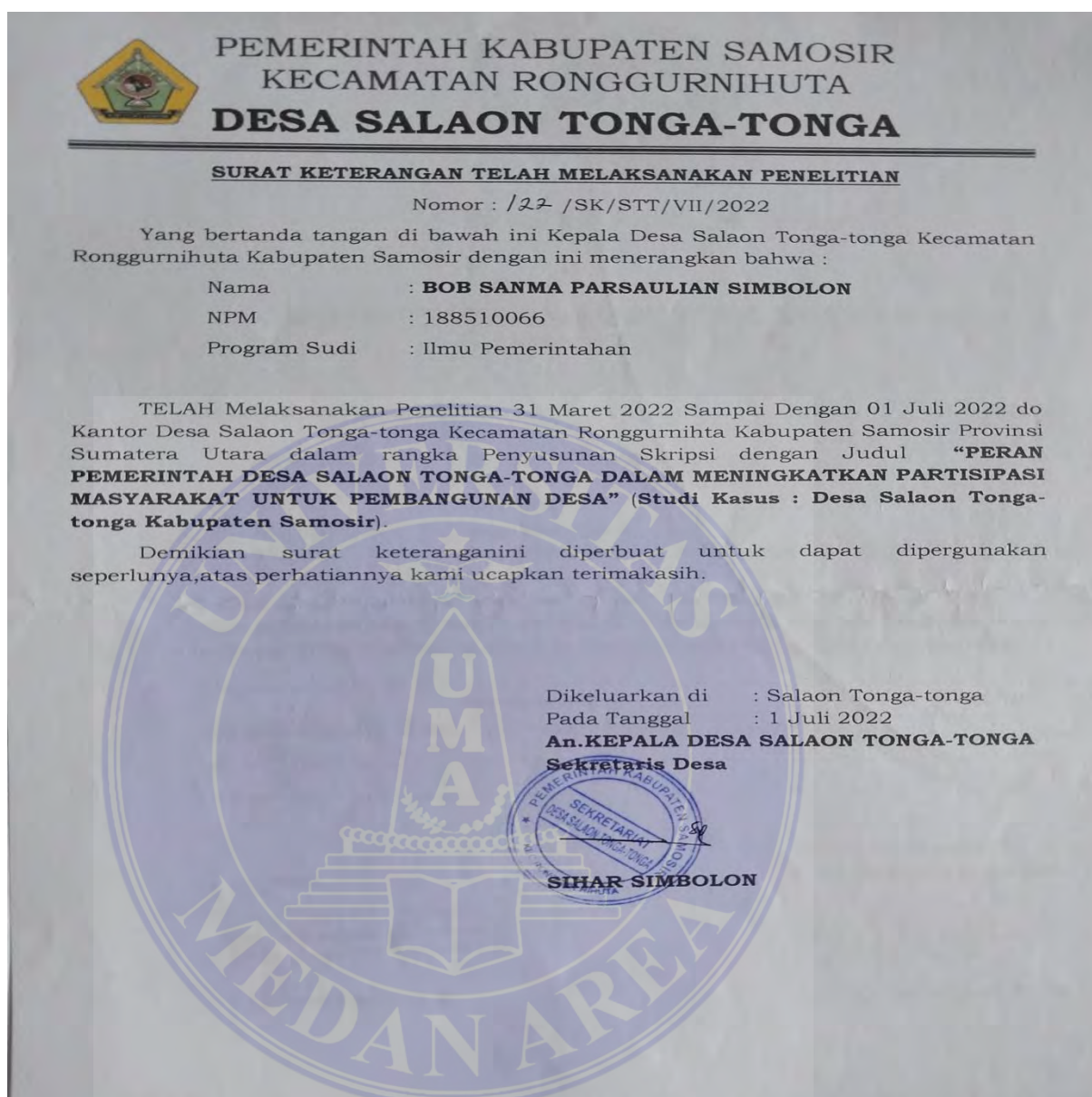


Gambar 3. Informan Utama
Bapak Sihar Simbolon selaku Sekretaris Desa Salaon Tonga-Tonga
(Sumber: Dokumen Pribadi, Kamis, 21 April 2022)




Gambar 4. Informan Tambahan
Bapak Mangelek Nainggolan selaku Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga
(Sumber: Dokumen Pribadi, Jumat, 29 April 2022)

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



Lampiran 4 Surat Pengambilan Data/Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 345 /FIS.1/01.10/III/2022 08 Maret 2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Ka. Desa Salaon Tonga Tonga Kab. Samosir
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Bob Sanma Parsaulian Simbolon
N P M : 188510066
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Kepala Desa Salaon Tonga Tonga Kab. Samosir, dengan judul Skripsi "*Peran Pemerintah Desa Salaon Tonga-Tonga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Salaon Tonga-Tonga Kecamatan Ronggumihuta Kabupaten Samosir)*"


Pertu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Efhah Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Lampiran 5 Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Polma Malau S. Pd
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 35 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Salaon Tonga-Tonga

2. Informan Utama

Nama : Sihar Simbolon
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 45 Tahun
Jabatan : Sekretaris Desa Salaon Tonga-Tonga

3. Informan Tambahan

Nama : Jonner Manik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Ketua BPD Desa Salaon Tonga-Tonga

4. Informan Tambahan

Nama : Mangelek Nainggolan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 40 Tahun
Jabatan : Masyarakat Desa Salaon Tonga-Tonga